

Titik Balik Ekonomi Indonesia Pasca Kemerdekaan: Perspektif Materialisme Historis

Moch. Dimas Galuh Mahardika

Universitas Sebelas Maret

Email: dimas.dg20@gmail.com

Received: 2022-04-03

Revised: 2022-06-12

Accepted: 2022-07-25

Published: 2022-08-30

Abstract

Meja Bundar Conference held in Den Haag at 1949 was an achievement in the diplomatic process of the Indonesian nation to show its existence as an independent and politically sovereign country. However, on the economic aspect, the results of the conference did not favor the Indonesian government. The Dutch debt burden was imposed on the Indonesian government as a reciprocity for the Dutch recognition of Indonesia's political sovereignty. As a country that is young and unestablished economically yet, of course the requirements are very burdensome. Therefore, the government is looking for an effective way out to meet these requirements. One of the paths taken is to nationalize foreign companies that were still operating at the time. The decision also considered suitable to build the foundation of the national economy and dismantle the colonial economic system that had previously been formed. So to achieve this goal, political elites and society, especially laborer must be participated. This article, written using historical methods, aims to elaborate on the collaboration between political elites and laborer an effort to nationalize foreign companies in the 1950's from a historical materialism perspective.

Keywords: *Meja Bundar Conference; Nationalization of foreign companies; Indonesia government; laborer; historical materialism.*

Abstrak

Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag pada 1949 merupakan suatu pencapaian dalam proses diplomatik bangsa Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang mandiri dan berdaulat secara politik. Akan tetapi pada aspek ekonomi, hasil dari konferensi tersebut justru tidak berpihak kepada pemerintah Indonesia. Beban hutang Belanda dibebankan kepada pemerintah Indonesia sebagai timbal balik atas pengakuan Belanda atas kedaulatan politik Indonesia. Sebagai negara yang masih muda dan belum mapan secara ekonomi, tentu persyaratan tersebut sangat memberatkan. Untuk itu maka pemerintah mencari jalan keluar yang dianggap efektif untuk memenuhi persyaratan tersebut. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang masih beroperasi pada saat itu. Jalan itu juga dianggap cocok untuk membangun fondasi perekonomian nasional dan membongkar sistem ekonomi kolonial yang sebelumnya sudah terbentuk. Maka di dalam mencapai tujuan itu, para elite politik dan masyarakat kecil utamanya buruh turut berpartisipasi. Artikel yang ditulis menggunakan metode historis ini bertujuan untuk mengelaborasi sinergitas antara elite politik dengan buruh dalam upaya nasionalisasi perusahaan asing periode 1950-an dalam perspektif materialisme historis.

Kata kunci: *Konferensi meja bundar, nasionalisasi perusahaan asing, pemerintah Indonesia, buruh, materialisme historis.*

Copyright © 2022, *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*. All right reserved

Pendahuluan

Artikel Ilmiah ditulis dengan format 1 kolom, ditulis langsung setelah kata kunci, Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak awal perjalanan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil kerja dan perjuangan bangsa Indonesia,

sekaligus menunjukkan kepada negara-negara sekutu bahwa Indonesia bukan merupakan 'boneka' fasis, maka kerangka politik konstitusional dalam negeri harus diubah. Bulan November 1945, dibuatlah Maklumat Pemerintah No. X yang mengatur pembentukan multi-partai dalam sistem politik, dengan suatu kabinet yang bertanggungjawab secara langsung kepada parlemen dan diisi oleh partai-partai tersebut (Basundoro, 2017). Dalam aspek ekonomi, sebagai negara merdeka Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan melakukan 'de-kolonisasi' struktur ekonomi kolonial yang telah mengakar pada sistem ekonomi Indonesia selama masa penjajahan, menjadi sistem ekonomi nasional yang perpipah kepada kemaslahatan masyarakat Indonesia itu sendiri. Struktur perekonomian kolonial yang berkembang di Indonesia sebagai sebuah warisan dari kolonisasi Belanda bergantung pada kegiatan produksi dalam bidang pertanian dan perkebunan, sedangkan sektor ekonomi modern seperti distribusi transportasi, pertambangan dan perbankan kebanyakan masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing (Booth dkk., 1988).

Sebagai bangsa yang baru saja merdeka, justru kemudian memunculkan berbagai permasalahan pada kisaran tahun 1945 hingga 1960-an. Indonesia masih mengalami gejolak politik-ekonomi dan sosial dalam masyarakatnya terlebih masih terjadi berbagai konfrontasi dengan Belanda. Kemerdekaan Indonesia ketika itu mendapat tantangan dari pemerintah kolonial Belanda yang masih memiliki hasrat untuk mendapatkan kembali kekuasaannya atas Indonesia. Dampaknya, pengakuan kedaulatan ditahun 1949 masih belum dirasakan Indonesia dalam bidang ekonomi (Sismudjito, 2015).

Ketika Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan atas kekuasaannya secara *de jure* oleh pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949 yang diistilahkan sebagai KMB (Konferensi Meja Bundar), negara baru ini menghadapi beberapa persoalan serius. Meskipun pengakuan kedaulatan Republik Indonesia disambut dengan gembira oleh mayoritas rakyat, namun para elite berhaluan nasionalis merasa kurang puas dengan hasil konferensi tersebut. Ibarat "tidak ada makan siang gratis", pemerintah Belanda memberikan persyaratan berat kepada Indonesia sebagai bentuk imbalan atas pengakuan kedaulatan yang telah diberikan (Budi, 2013; Vickers, 2005). Salah satu syarat yang diajukan oleh Belanda yaitu Indonesia harus memberi izin supaya perusahaan-perusahaan Belanda kembalid dapat beroperasi, berikutnya Indonesia juga harus membayar hutang Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Seluruh hutang tersebut jika dihitung mencapai mencapai USD 1,13 miliar, baik hutang luar negeri maupun hutang dalam negeri. Dampak pembebanan hutang tersebut kembali membuat perekonomian Indonesia berada pada posisi yang kurang menguntungkan (Dick dkk., 2002; Platje, 2001; Thee, 2005).

Berdasarkan keputusan Konferensi Meja Bundar tahun 1949 sangat terlihat bahwa pemerintah kolonial Belanda mendapatkan banyak keuntungan di bidang politik. Adanya berbagai perusahaan Belanda yang masih beroperasi di Indonesia, maka pemerintah Belanda memandang bahwa Indonesia masih menjadi ladang penghasilan dalam menutupi kekacauan perekonomian negaranya yang menderita kerugian selama Perang Dunia II (Hartono, 2008). Selain itu hasil konferensi di Den Haag ini juga berisi jaminan tentang hak-hak yang diberikan kepada modal asing harus dihormati. Hal ini jelas memberikan kesempatan kepada Belanda untuk terus mengendalikan sektor perekonomian Indonesia dalam komoditas dagang yang dianggap penting (Ginting, 2007).

Hasil KMB menjadi suatu dilema tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Sebagai negara yang baru merdeka, sebagian besar pendapatan negara bergantung dari pajak, bea cukai, dan devisa berbagai perusahaan asing yang masih eksis. Selain itu pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan melindungi rakyat yang tergolong dalam ekonomi lemah. Golongan ekonomi lemah biasanya identik dengan rakyat bumiputera Indonesia, meskipun terdapat beberapa golongan dalam kelas sosial tertentu yang ekonominya cukup kuat. Keuntungan yang diperoleh Belanda dari perjanjian KMB membuat Belanda terus gencar menanamkan modalnya di Indonesia dan mendirikan berbagai perusahaan. Eksistensi modal asing di Indonesia

setidaknya telah hadir sebelum tahun 1930-an yang bergerak sebagian besar di bidang pertambangan dan perkebunan (Chalmers, 1996). Selain itu, beberapa pabrik yang berfokus di bidang otomotif dan produk lainnya juga mulai bermunculan. Sekitar era 1930-an, *Unilever* untuk pertama kalinya di Indonesia membuka pabrik margarin dan sabun, kemudian perusahaan transportasi *Goodyear* membuka pabrik ban, pabrik *British and American Tobacco*, serta pabrik perakitan *General Motors*. Selain itu, terdapat banyak investasi asing yang turut membangun dan berinvestasi seperti pabrik cat, tinta, listrik, radio, kosmetik dan baterai (Zanden & Marks, 2013).

Artikel ini ditulis untuk mengelaborasi sinergitas antara elite politik yang bergerak di lapangan diplomasi dan buruh yang bergerak di lapangan yang ‘sesungguhnya’. Maka proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing ini tidak dapat semata-mata dipisahkan dari gerakan bawah yang secara langsung turun ke jalan-jalan untuk mendesak disegerakannya proses nasionalisasi. Meskipun nantinya ketika perusahaan-perusahaan tersebut sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia, buruh-buruh ini seolah-olah tersingkir dari panggung utama perekonomian karena mereka tidak mendapatkan posisi yang penting dalam menggerakkan roda perusahaan tersebut. Minimal, tinjauan dari perspektif materialisme historis akan dapat memberikan gambaran kepada kita semua bahwa ada faktor-faktor teoritis dan praktis yang mendasari gerakan dan partisipasi buruh dalam proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di periode pasca-kemerdekaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Materialisme Historis

Karl Marx lahir dan hidup di tengah situasi sosial yang tidak menguntungkan untuk kehidupannya saat itu. Ia melihat adanya kesenjangan sosial yang cukup kuat ketika kapitalisme dipraktikkan dengan merugikan salah satu golongan masyarakat, yakni masyarakat kecil yang ia sebut sebagai “proletariat”. Orang-orang inilah yang sesungguhnya merasakan dampak negatif dari praktik kapitalisme. Sebagai seorang Hegelian, Marx berusaha melengkapi perspektif Hegel yang bertumpu pada “ide” untuk mewujudkan sebuah kebebasan. Marx beranggapan tidak ada kebebasan yang dapat dicapai tanpa adanya gerakan/*praxis* yang konkrit. Secara langsung, Marx menyangkal ide Hegel secara dialektis dengan memusatkan gerakan pada tataran praktis di dalam realitas masyarakat sebagai jalan untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan (Vidal dkk., 2019). Selain itu, Marx juga beranggapan bahwa arah gerak sejarah manusia ditentukan oleh dorongan motif ekonomi, dan kebutuhan akan materi. (Fuadi, 2015). Dalam menggerakkan arah sejarah, manusia bertumpu pada kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang akan mengarah kepada perubahan yang diinginkan secara kolektif.

Fuadi (2015: 233) menjabarkan beberapa poin tentang aspek-aspek material historis menurut Marx. Aspek-aspek tersebut di antaranya: (a) produksi sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup, yakni kehidupan materialis itu sendiri karena produksi merupakan watak yang natural sebagai dasar perubahan historis itu sendiri; (b) kebutuhan hidup yang muncul harus diproduksi karena berkaitan dengan peningkatan populasi manusia di dalam lingkungan kolektifnya; (c) manusia senantiasa berkembang biak sebagai akibat dari aktifitas seksual-biologis, maka kebutuhan produksi harus diarahkan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kolektif itu; (d) produksi yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan hidup mempunyai dua relasi, yakni relasi alamiah dengan relasi sosial; (e) kesimpulan dari beberapa aspek tersebut adalah kesadaran yang dimiliki oleh manusia bukanlah kesadaran murni, melainkan kesadaran yang didasarkan atas kebutuhan materi.

Menindak lanjuti konsep Marx tentang materialisme historis, perubahan keadaan tidak ditentukan oleh kesadaran manusia melainkan keadaan sosial-lah yang menentukan keadaan. Kesadaran didasarkan pada kondisi material yang ada. Selama perekonomian masih dikendalikan oleh golongan tertentu, maka pada saat yang sama kesadaran tentang material belum dapat tercapai. Dalam konsep produksi, menurut materialisme historis Marx bahwa

perubahan masyarakat kongruen dengan perubahan cara produksi (Magnis-Suseno, 1999). Golongan yang ditekankan oleh Marx dalam konsep materialisme historis untuk membawa perubahan adalah golongan proletariat yang menjadi korban atas kekejaman sistem kapitalisme. Dalam bergerak, golongan juga harus dikoordinir oleh seorang pemimpin, baik itu perseorangan maupun institusi/negara. Tatahan sosial akan teratur apabila faktor produksi dapat didistribusikan untuk kepentingan bersama. Gerakan menuai perubahan ini memungkinkan untuk dilaksanakan dengan proses dialektika dan pendekatan konflik di dalam praktiknya (Sayer, 1987). Hal ini disahkan karena penghisapan atas manusia di dalam sistem kapitalisme sudah berjalan dalam waktu yang cukup panjang, yang secara tidak langsung sistem itulah yang memunculkan *boomerang* untuk dirinya sendiri.

Konsep tersebut sama seperti apa yang diungkapkan oleh Frederick & Soeroto (2017) yang juga mengutip pernyataan Sukarno bahwa revolusi dan gerakan massa adalah bentuk dari reaksi atas sistem kapitalisme yang dipraktikan oleh orang-orang imperialis itu sendiri. Dengan 'cantik' dan lugas, Sukarno beranggapan bahwa rakyat tidak akan menghendaki revolusi apabila *pergaulan hidupnya* tidak dicampuri oleh kerugian yang dihasilkan dari penghisapan kapitalisme. Inilah yang kemudian barangkali menjadi dasar bagi gerakan-gerakan buruh pasca-kemerdekaan untuk ikut berpartisipasi dalam membentuk sistem ekonomi yang berbasis kepada kesejahteraan rakyat kecil. Kehidupan yang sengsara akibat dari kolonisasi selama beberapa abad ke belakang menimbulkan satu reaksi keras apabila ada satu momentum yang mendukung untuk mereka bergerak secara bersama-sama.

Metode Penelitian

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode historis (Kuntowijoyo, 2005) dan pendekatan studi pustaka (Zed, 2004). Pertama kali penulis menentukan tema yang akan dibahas secara spesifik. Kemudian berikutnya mengumpulkan sumber-sumber yang dianggap sesuai dan relevan sebagai dasar penulisan artikel ini. Sumber-sumber yang digunakan adalah sumber-sumber skunder hasil penelitian baik berupa buku maupun jurnal. Beberapa sumber yang telah terkumpul kemudian di analisis untuk dicari fakta-fakta yang saling berkesinambungan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran fakta yang objektif. Penulis menginterpretasi substansi dari informasi yang telah di dapatkan untuk kemudian dielaborasi menjadi sebuah tulisan.

Hasil dan Pembahasan

Ekonomi Indonesia Pasca-Kemerdekaan

Menciptakan sekaligus mengembangkan golongan pengusaha bumiputera merupakan tugas dan kewajiban pemerintah Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan golongan bumiputera yang memiliki daya saing ekonomi kuat dalam perputaran roda perekonomian dalam negeri yang sebelumnya sudah banyak diisi oleh para pengusaha asing. Meskipun kedaulatan politik sebagai negara independen telah diakui dalam KMB 1949, akan tetapi sektor perekonomian Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang perusahaan milik Belanda. Isi KMB 1949 secara jelas menegaskan banyaknya keuntungan yang didapatkan oleh pemodal swasta Belanda, dan hal tersebut secara terpaksa harus diterima mengingat kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu masih belum memiliki kondisi yang kuat untuk menciptakan iklim ekonomi yang berporos pada aktifitas perekonomian lokal. KMB memberikan beban ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Hasil KMB di bidang ekonomi dituangkan dalam Kesepakatan Ekonomi Keuangan (*Financial-Economic Agreement*) dijabarkan oleh Boediono (2016: 67) sebagai berikut: (1) perusahaan-perusahaan Belanda diperbolehkan beroperasi kembali seperti sebelum perang, termasuk kebebasan untuk mentransfer keuntungannya; (2) Indonesia menanggung biaya pembayaran uang pemerintah Hindia Belanda (dalam dan luar negeri) sebesar USD 1,13 miliar; (3) Untuk kebijakan tertentu (misalnya: nasionalisasi); Indonesia perlu berkonsultasi atau dan meminta persetujuan pemerintah Belanda; (4)

Indonesia menanggung biaya 17.000 karyawan eks Belanda yang berada di Indonesia selama 2 tahun dan menampung 26.000 tentara eks KNIL.

Sumber pokok investasi asing yang masuk ke Indonesia sebagian besar berasal dari negara Belanda. Tujuan Pemerintah Belanda mengirimkan investasi pada tahun itu adalah untuk melayani kebutuhan produk dalam negerinya serta penguatan sektor perekonomian di tanah koloni. Telah disebutkan sebelumnya bahwa modal swasta sebagian besar berasal dari sektor perkebunan dengan jumlah sekitar 80%. Dalam hal ini Belanda tidak berperan sendirian, konstelasi ini juga melibatkan Inggris dan Amerika Serikat. Seperti misalnya pada tahun 1922 Inggris menanamkan modalnya di sektor perkebunan sebesar 245 juta gulden (77,5%), sedangkan dalam industri pengolahan sebesar 55 juta gulden atau sekitar 22,5% dari nilai total investasi perkebunan. Di saat yang sama, Amerika juga turut andil dalam geliat investasi pada sektor perkebunan dengan jumlah 28 juta gulden atau sekitar 70% dan industri pengolahan 7 juta gulden dengan prosentase sebesar 29% (Kanumoyoso, 2001).

Pemerintah kolonial kemudian kembali mendorong pertumbuhan perekonomian dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang berlaku sejak paruh periode 1930-an. Pada periode tersebut dikeluarkan peraturan yang membatasi kegiatan manufaktur dan impor barang dari Jepang. Pada tahun 1937, strategi pembangunan jangka panjang mulai dirumuskan oleh Departemen Urusan Ekonomi, dan hasilnya pada tahun 1941 pemerintah membuat *Industrieplan* dengan tujuan agar mayoritas perusahaan negara dapat membangun pabrik dengan skala besar agar dapat menghasilkan bahan baku yang dibutuhkan oleh dunia industri (Chalmers, 1996; Mahardika & Ramadhan, 2021).

Apabila di awal abad 19 pertumbuhan ekonomi pada sektor industri ditunjang oleh hasil pertanian seperti tembakau, karet, kopi, teh, gula dan kelapa sawit, maka pada awal abad ke-20 inisiatif pembangunan ekonomi diambil alih oleh berbagai macam perusahaan dagang. Mereka merupakan salah satu motor penggerak lahirnya industri modern. Meskipun demikian, mayoritas perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik Belanda. Berbagai perusahaan tersebut cukup bervariasi mulai dari kantor cabang suatu perusahaan asing, sampai dengan perusahaan lokal yang menjadi agen tunggal dan bertugas mewakili perusahaan luar negeri (Booth, 1998).

Perkembangan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari periode kolonial Hindia-Belanda yang dapat diartikan bahwa perusahaan Belanda masih memegang sebagian besar sektor perekonomian yang penting, sedangkan pengusaha bumiputera hanya memegang kendali industri kecil dalam ruang lingkup yang kecil pula. Hingga sekitar tahun 1957- 1958, sebesar 80% dari banyaknya hasil perkebunan Indonesia dikirim ke Eropa dengan melibatkan agen pedagang-pedagang Belanda di kota Amsterdam, sebab perkebunan-perkebunan besar di Indonesia yang sebelumnya dijalankan oleh Belanda memiliki kantor pusat dan cabang yang bertempat di Belanda yang bertugas mendistribusikan hasil produksi (Kanumoyoso, 2001). Berdasarkan paparan berbagai persoalan di atas, sudah jelas bahwa perekonomian Indonesia masih didominasi oleh aktifitas ekonomi asing. Pemerintah Indonesia yang tengah berupaya mewujudkan sistem ekonomi nasional yang mandiri mendapatkan kendala selama modal asing masih beroperasi dan mendominasi aktifitas ekonomi di Indonesia. Salah satu solusi yang saat itu dianggap jitu untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan nasionalisasi berbagai perusahaan asing yang masih beroperasi.

Peristiwa ini dapat diamati dengan menggunakan perspektif materialisme historis ala Karl Marx. Karl Marx menawarkan sejumlah rumusan untuk memahami kondisi sosial masyarakat yang sedang terbelenggu sistem kapitalisme yang dihasilkan dari praktik kolonialisme. Masyarakat kecil yang dipekerjakan oleh para kapitalis berpeluang untuk tidak mendapatkan banyak keuntungan seperti apa yang didapatkan tuan-tuannya. Pekerja diperas tenaganya, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin bertambah hartanya. Seperti apa yang diistilahkan Sukarno sebagai “penindasan atas sebuah bangsa oleh bangsa yang lain”,

praktik kolonialisme di Indonesia juga menimbulkan banyak kesengsaraan kepada rakyat bumiputera. *Keinsafan* rakyat yang tertindas agaknya belum dapat tergorganisir dengan baik apabila tidak disatukan kekuatannya dan tidak dipimpin pergerakannya (Soekarno, 2012). Maka ketika ada satu momentum yang dapat mereka gunakan untuk menghimpun kekuatan dan melakukan sebuah gerakan, mereka akan bersatu dan bergerak untuk mencapai tujuan yang dianggap mulia, yakni mengatur perekonomian yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan banyak orang.

Seperti halnya yang terjadi pada peristiwa nasionalisasi perusahaan asing ini, beberapa organisasi yang berideologi kiri seperti misalnya SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) memiliki inisiatif untuk melakukan desakan dalam rangka mengambil alih faktor-faktor produksi yang masih diduduki oleh asing (Dharmawan, 2011). Mereka dapat melakukan gerakan karena beberapa faktor, *pertama* mereka adalah organisasi buruh yang terbesar pada saat itu. Sehingga dalam melakukan gerakan massa, mereka dapat mengumpulkan orang dengan jumlah yang besar. *Kedua* organisasi ini mendapatkan dukungan penuh oleh Sukarno, mengingat Sukarno juga merupakan salah satu orang yang mengambil nilai-nilai perjuangan ala Marxis sehingga memiliki satu kesamaan tujuan dalam membangun kemandirian ekonomi (Mortimer, 2006). *Ketiga*, organisasi semacam SOBSI adalah organisasi yang bersifat homogen dalam tubuh internalnya. Mereka memiliki satu nasib dan satu pilihan hidup yang sama sebagai akibat dari praktik kolonial yang tidak berpihak kepada kesejahteraan buruh. Maka di bab selanjutnya kita akan melihat peran organisasi kiri ini dalam mendesak proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada-kemerdekaan di periode 1950an.

Peralihan Kekuasaan Perusahaan Asing Kepada Pemerintah Indonesia

Desakan nasionalisasi oleh gerakan buruh kepada perusahaan-perusahaan Belanda yang hingga tahun 1950-an masih mendominasi perekonomian Indonesia mulai terus menerus digaungkan. Pada bulan November tahun 1957 isu nasionalisasi semakin sering didengungkan sebagai bentuk respon terhadap buntunya langkah-langkah diplomasi dalam penyelesaian sengketa wilayah Irian Barat di forum Perserikatan Bangsa atau PBB, bahwa Irian Barat cepat atau lambat akan menjadi negara bagian dari Belanda. Kegagalan sidang umum PBB ke-12 dalam menyelesaikan persoalan sengketa Irian Barat sangat mengecewakan pemerintah Indonesia, sehingga kemudian pemerintah Kabinet Djuanda mengeluarkan putusan yang berisi tentang rencana pemulangan orang-orang Belanda yang masih melakukan aktifitas di Indonesia.

Sentimen anti Belanda semakin menguat di kalangan masyarakat bumiputera, ketika itu gerakan-gerakan yang dikordinir oleh buruh sudah tidak bisa dikendalikan sehingga kemudian melahirkan sebuah aksi mogok kerja. Corat-corek tembok yang dilakukan buruh seolah memberikan isyarat bahwa pengambil alihan perusahaan Belanda harus dilakukan. Pada tanggal 6 Desember 1950 pemerintah mengambil alih perusahaan pelayaran Belanda *Paketvaart Maatschappij* yang bertempat di Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta (Surowo, 2016). Upaya nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia mungkin dapat dikatakan sebagai sikap menantang atas kekecewaan hasil Sidang Umum PBB. Bisa juga sebagai upaya pembelaan dalam negeri atas kepentingan ekonomi rakyat Indonesia. Bahkan banyak disebut sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam menekan Belanda dan memperjuangkan wilayah Irian Barat yang sudah berlangsung sejak tahun 1949 dan terus diulur. Bahkan upaya nasionalisasi dalam rangka mengakhiri dominasi perusahaan Belanda membutuhkan suatu alasan yang kuat untuk dijadikan dasar legitimasi. Momentum yang dianggap tepat ketika itu adalah memburuknya hubungan Indonesia dengan Belanda terkait sengketa Irian Barat (Kanumoyoso, 2001).

Kebuntuan mencari jalan keluar dalam menyelesaikan sengketa Irian Barat, berdampak pada buruknya hubungan antara Indonesia dan Belanda. Pada 21 Februari 1956 Kabinet

Burhanuddin Harahap membatalkan hasil perjanjian KMB secara sepihak dan menolak untuk membayar hutang Indonesia kepada Belanda sebagai salah satu isi penting perjanjian tersebut. Sikap didasarkan pada dalil bahwa hutang yang dibebankan kepada Indonesia merupakan dana operasional perang Belanda dalam menghalangi revolusi nasional. Penghapusan hutang ini mendapat respon sangat baik dari kalangan mayoritas rakyat Indonesia karena mereka tidak perlu lagi memikirkan cara bagaimana bekerja untuk melunasi hutang negara (Ricklefs, 2007).

Pada bulan November 1957, kondisi politik dalam negeri semakin memanas. Tanggal 29 November 1957 merupakan tanggal ketika PBB menolak resolusi Indonesia yang memberikan himbauan kepada Belanda agar bersedia merundingkan kembali persoalan Irian Barat. Indonesia dengan berat hati harus menerima hasil pemungutan suara dan kesepakatan dalam resolusi tersebut. Sebelum pemungutan suara terkait dengan resolusi Indonesia dilaksanakan, Presiden Soekarno memberikan peringatan bahwa Indonesia akan mengambil tindakan yang dianggap perlu apabila langkah diplomatis tidak menemui jalan terang. Sebagai respon atas sikap Belanda yang tidak kunjung memberikan jalan keluar, pada tanggal 1 Desember 1957 pemerintah Indonesia secara resmi menginstruksikan kepada buruh yang bekerja di perusahaan Belanda untuk melakukan aksi mogok kerja selama 24 jam. Tindakan ini yang kemudian memantik aksi penuntutan agar perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi secara besar-besaran. Akibat aksi mogok selama 24 jam tersebut, perusahaan-perusahaan Belanda diperkirakan mengalami kerugian yang sangat besar (Hägerdal, 2009; Kanumoyoso, 2001).

Penggerak utama aksi mogok untuk menuntut nasionalisasi perusahaan Belanda itu dilakukan oleh kelompok Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia (KBKI) (Mintz, 2002). Aksi pengambilalihan terjadi bersamaan dengan keluarnya instruksi pemerintah Indonesia kepada semua perusahaan Belanda yang sedang beroperasi untuk menghentikan aktifitas mereka. Sehari setelah keluarnya instruksi ini, pada tanggal 7 Desember 1957 aksi-aksi perebutan perusahaan Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia bersamaan dengan terjadinya perebutan kantor pabrik dan aset aset perusahaan Belanda yang dianggap fundamental. Tepatnya pada tahun 1957 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda sebagai bentuk ketegasan Indonesia terhadap sikap Belanda yang dianggap selalu merugikan.

Perjuangan pemerintah Indonesia dalam mengambilalih perusahaan Belanda dilakukan secara serius dengan memprioritaskan sektor-sektor yang dianggap sangat penting. Misalnya pada 1953, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi *De Javanesche Bank* dan untuk memunculkan identitas ke-Indonesiaan kemudian namanya dirubah menjadi Bank Indonesia. Selain itu pemerintah Indonesia juga membentuk *Financial Bank* yaitu Bank Industri Negara yang akan membiayai berbagai proyek industri dan membiayai kegiatan impor (Nurbaiti dkk., 2019). Pada era kabinet Wilopo nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan listrik dan penerbangan turut dilakukan. Langkah selanjutnya yakni mengamankan usaha-usaha yang menyangkut hajat hidup banyak orang seperti balai gadai, pertanian, pos, telepon, rel kereta, pelabuhan, perkebunan dan pertambangan. Tindakan nasionalisasi ini semakin meluas beriringan dengan dorongan mobilisasi oleh kaum pekerja atau buruh (Hartono, 2008).

Bagi buruh yang selama beberapa dekade menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional, kemerdekaan yang diraih pada 17 Agustus 1945 dianggap sebagai momentum pembebasan dari eksploitasi modal asing yang dipraktikkan oleh pemerintah kolonial (Wasino, 2019). Peran pemerintah nasional Indonesia juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi perjuangan golongan buruh dalam memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Oleh sebab itu, pemerintah wajib memperjuangkan nasib dan kesejahteraan kaum buruh sehingga kemudian mereka tergugah untuk menunaikan tugas penting tersebut. Bersama dengan kekuatan lainnya, kelompok buruh bergerak untuk mewujudkan sebuah kedaulatan ekonomi. Pada tanggal akhir 1957 pemerintah secara resmi menginstruksikan agar kelompok militer menguasai perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda termasuk perusahaan-perusahaan

yang telah diambil alih dan dikuasai oleh kaum buruh (Vickers, 2005). Mengingat golongan buruh adalah kelompok masyarakat menengah ke bawah ketika mereka mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut, dan mereka tidak memiliki keterampilan manajerial untuk menjalankan perusahaan-perusahaan yang telah diambil alih. Maka satu-satunya lembaga yang dianggap paling siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pengelolaan menejiral itu adalah kelompok militer (Crouch, 2007). Beberapa perusahaan Belanda yang berhasil dinasionalisasi kemudian dikelola oleh sumber daya manusia yang ada. Selain mengambilalih perusahaan, terjadi pula pemulangan para pegawai Belanda yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu untuk netralisasi unsur-unsur asing.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur jalannya nasionalisasi pada akhir 1958. Pada tanggal 3 Desember 1958 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui undang-undang nasionalisasi untuk semua perusahaan Belanda yang beroperasi di wilayah Indonesia. Menyusul pengesahan undang-undang ini pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 23/1958 yang secara tegas menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan Belanda telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan di tahun 1959 mengenai penentuan perusahaan Belanda yang akan dinasionalisasikan (K anumoyoso, 2001). Dengan adanya pengambilalihan ini, secara tegas membuktikan bahwa Indonesia mampu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia mampu mengambil sikap dan tindakan untuk memenuhi kepentingan dan hajat hidupnya tanpa bergantung pada pihak lain. Sikap ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memperhatikan penuh keadaan ekonomi rakyatnya yang terbelenggu dengan adanya perusahaan asing (Wasino, 2016). Dengan adanya nasionalisasi maka masyarakat Indonesia memiliki harapan sekaligus berkesempatan besar untuk mengisi dan berperan aktif sebagai pemilik tanah Indonesia bukan sebagai budak pekerja. Semangat juang memperbaiki dan kebebasan hidup menjadi suatu momen yang penting dalam babakan baru sejarah perjalanan bangsa ini.

Kesimpulan

Upaya nasionalisasi perusahaan asing pasca kemerdekaan dilakukan berbagai elemen bangsa. Pihak-pihak yang terlibat di dalam peristiwa ini adalah pihak-pihak yang memiliki kesadaran akan kemandirian sosial politik dan ekonomi negara mudanya. Dalam pembahasan di atas, kita dapat melihat adanya sinergitas antara elite politik dengan buruh. Secara alamiah mereka memahami tugas masing-masing, para elite poliitik bertempur di lapangan diplomatik, dan mereka yang berada di tataran *grass root* bertempur di medan yang sesungguhnya. Gerakan-gerakan mogok kerja, coret-corek tembok merupakan satu tindakan yang menunjukkan keinginan para buruh untuk berdaulat secara ekonomi. Pemerintah pada momentum yang tepat membuat sebuah peraturan untuk melancarkan kegiatan nasionalisasi dan netralisir perusahaan-perusahaan dari kepentingan asing itu sendiri. Maka hal-hal semacam ini yang perlu kita jadikan renungan bersama, bahwa untuk membangun perekonomian yang mapan dan berpihak kepada kemaslahatan rakyat adalah adanya sinergitas yang saling mengisi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam konteks ini, penulis sedang tidak berbicara soal ideologi politik institusional yang mendasari gerakan itu, namun pada intinya bahwa kesadaran akan kemandirian semua elemen bangsa akan dapat menyelamatkan dan turut menentukan kelangsungan bangsa ini di waktu yang akan datang. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di periode 1950-an ini adalah tonggak dan babakan sejarah baru dalam perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan yang memiliki dampak secara makro pada perekonomian Indonesia hari ini.

Referensi

Basundoro, P. (2017). *Minyak Bumi dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia 1950-1960an*. Airlangga University Press.

- Boediono. (2016). *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*. Penebir Mizan.
- Booth, A. (1998). *The Indonesian Economy in The Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*. Macmillan [u.a.].
- Booth, A., O'Malley, W. J., & Weidemann, A. (1988). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Budi, L. S. (2013). Kisah di Balik Arsip: Kesepakatan Bidang Ekonomi dalam KMB dan Pasang Surut Hubungan Indonesia-Belanda. *Majalah Arsip, Kemerdekaan dan Kebebasan Memperoleh Informasi*, 16(1).
- Chalmers, I. (1996). *Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia*. Gramedia Pustaka.
- Crouch, H. A. (2007). *The Army and Politics in Indonesia* (1st Equinox ed). Equinox Pub.
- Dharmawan, R. (2011). *Inkonsistensi Gerakan Radikal Kiri: Praktik Politik Kaum Komunis di Indonesia*. Kreasi Wacana.
- Dick, H. W., Houben, V. J. H., Lindblad, J. T., & Thee, K. W. (Ed.). (2002). *The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000*. Allen & Unwin [u.a.].
- Frederick, W. H., & Soeroto, S. (2017). *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, (LP3ES).
- Fuadi. (2015). Metode Historis: Suatu Kajian Materealisme Karl Marx. *Substantia*, 17(2), 220–230.
- Ginting, B. (2007). *Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum atas Kegiatan Investasi di Indonesia*. 12(2), 101–111.
- Hägerdal, H. (2009). *Responding to The West: Essays on Colonial Domination and Asian Agency*. Amsterdam University Press.
- Hartono, R. (2008). Gerakan Banting Stir Ekonomi Soekarno: Haluan Ekonomi Anti Imperialisme. *Berdikari*, 9, 6–8.
- Kanumoyoso, B. (2001). *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.
- Magnis-Suseno, F. (1999). *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahardika, M. D. G., & Ramadhan, F. N. (2021). Dugaan Penyelewengan Program Ekonomi Benteng Untuk Kepentingan Pemilihan Umum 1955. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 4(2), 123–130.
- Mintz, J. S. (2002). *Muhammad, Marx, Marhaen: Akar sosialisme Indonesia*. Pustaka Pelajar.

- Mortimer, R. (2006). *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965* (1st Equinox ed). Equinox Pub.
- Nurbaity, Hidayat, A., & Hidayat, F. (2019). *Dinamika Nasionalisasi De Javasche Bank: Sebuah Perjuangan Menjadi Bank Indonesia (1950-1953)*. Seminar Nasional Sejarah Ke-4 Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang.
- Platje, W. (2001). Dutch Sigint and the Conflict with Indonesia 1950-62. *Intelligence and National Security*, 16(1), 285–312. <https://doi.org/10.1080/714002840>
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern*. Serambi Ilmu.
- Sayer, D. (1987). *The Violence of Abstraction: The Analytic Foundations of Historical Materialism*. B. Blackwell.
- Sismudjito. (2015). *Nasionalisasi Perusahaan Hindia Belanda dalam Perspektif Sosiologi*. Seminar Nasional Program Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Komunitas Implementasi Konsep Triple Bottom Lines.
- Soekarno. (2012). *Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme* (Cetakan pertama). Kreasi Wacana.
- Surowo, B. (2016). KPM Versus Pelni: Persaingan Merebut Hegemoni Jaringan Pelayaran di Nusantara, 1945-1960. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 1(1), 11–23.
- Thee, K. W. (2005). *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an Sampai 1990-an*. Pustaka Sinar Harapan.
- Vickers, A. (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Vidal, M., Smith, T., Rotta, T., & Prew, P. (2019). *The Oxford Handbook of Karl Marx*. Oxford University Press.
- Wasino. (2016). Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(1), 62–71.
- Wasino, dkk. (2019). *Plantation Capitalism and Peasant Economy in Java at the Dutch Colonial Time* (Cet. 1). LPPM Unnes.
- Zanden, J. L. van, & Marks, D. (2013). *An Economic History of Indonesia: 1800-2010*. Routledge.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.